

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antaraa Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Dana Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa- Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Adi, Priyo Hari. 2008. *Relevansi Transfer Pemerintah Pusat Dengan Upaya Pajak Daerah*. Jurnal Kritis. Universitas Satya Wacana. Salatiga.
- Ariani, Kurnia Rina dan Putri, Gustita Arnawati. 2015. "Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah". *ISSN*. 2460-0784.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014-2016. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Ernawati. 2017. "Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah". *ISSN*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol. 6, No. 2, 2460-0585.
- Erstelita. 2015. "Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat)". *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Waskito. 2010. Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh. BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol: 3 No.1 Januari 2010.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikasari, Putri. 2015. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014)”. *Artikel*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Imawan, Riswanda, dan Wahyudin, Agus. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Lestari, dkk. 2016. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Terhadap Belanja Modal ukuran dan kinerja Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara”. *ISSN*. Universitas Halu Oleo Kendari. Vol. 1, No. 2, 2502-5171.
- Marizka, Reza. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2011”. *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Muliana. 2009. *Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Machmud, M., G. Kawung, dan W . Rompas. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 14 No. 2: 1-13.
- Mahsun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Puspitasari, A. F. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 1 No. 2 : 1-22
- Nur'ainy, Renny dkk. 2013. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Di Jawa Barat)”. *ISSN*. Universitas Gunadarma Jakarta. Vol. 5, 1858-2559.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Putri dan Sjadili. 2013. “Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2006-2010)”.
- Susanti, dkk. 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)”. *ISSN*. Universitas Telkom Bandung. Vol. 3, No. 3, 2355-9357.
- Republik, Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik, Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik, Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sulianti dan Ika, Siti Rochmah. 2012. “Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra, Vol. 3, No.2 Hal 123-138

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) (diakses 17 Desember 2017 pukul 17:00 WIB)